

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Komite Sekolah

Komite sekolah atau madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan (Team Media, 2003: 7)

Dalam Kepmendiknas dengan tegas dinyatakan bahwa komite sekolah adalah badan usaha mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan (Sri Renani, 2008: 81-83) Dalam Kepmendiknas nomor 044/U/2002 tersebut ditegaskan bahwa dewan pendidikan (DP) berkedudukan di Kabupaten atau kota, sedang komite sekolah (KS) berkedudukan disatuan pendidikan, baik pendidikan sekolah atau madrasah maupun pendidikan luar sekolah.

Salah satu wujud aktualitasnya dibentuklah suatu badan yang mengganti keberadaan badan pembantu penyelenggaraan pendidikan (BP3) yakni komite sekolah melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 044/U/2002 tanggal 2 April 2002. Penggantian nama BP3 menjadi komite sekolah didasarkan atas perlunya ketertiban masyarakat secara penuh dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Komite sekolah merupakan nama baru pengganti badan pembantu penyelenggara pendidikan (BP3). Secara substansial kedua istilah tersebut tidak begitu mengalami perbedaan. Yang membedakan hanya terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan

mewujudkan mutu pendidikan. Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan diluar sekolah.

Latar belakang kelahiran komite sekolah tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan organisasi pendahulunya, yakni persatuan orang tua murid dan guru (POMG) dan badan pembantu penyelenggaraan pendidikan (BP3). Secara nasional BP3 lebih banyak digunakan, karena diatur dalam keputusan Mendikbud nomor 0293/U/1993 tentang badan pembantu penyelenggaraan pendidikan. BP3 lebih banyak digunakan, karena diatur dalam keputusan Mendikbud nomor 0293/U/1993 tentang badan pembantu penyelenggaraan pendidikan.

Sebutan POMG lebih terkenal digunakan sebelum Kepmendikbud tersebut diterbitkan, atau hanya beberapa daerah yang masih tetap menggunakan istilah itu, seperti di daerah Jakarta dan sekitarnya. Badan inilah yang sejak lama telah ada dan berperan cukup aktif dalam memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Secara konseptual, lembaga ini memang memiliki segi-segi positif dan negatif. Dari segi positif, peran BP3 kurang lebih memang sama dengan peran komite sekolah yang ada sekarang, lembaga ini sama dengan lembaga yang ada di beberapa negara lain, seperti Persatuan Ibu Bapa Guru (PIBG) di Malaysia, atau Parent Teacher Organization (PTO) atau Parent Teacher Association (PTA) di beberapa negara maju. Meskipun demikian, proses pembentukan BP3 di Indonesia terlalu diatur oleh pemerintah pusat, dengan AD/ART dan rambu-rambu program kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam AD/ART ditetapkan bahwa kepala sekolah berstatus sebagai pembina, dengan kedudukan berada diatas BP3 dan memiliki hubungan hierarki dengan BP3. Meski peran BP3 memang tidak hanya dalam aspek pemberian bantuan dalam bidang finansial atau keuangan, namun dalam praktik dilapangan peran utama BP3 memang terbatas kepada peran finansial tersebut.

Dalam perjalanannya, pelaksanaan peran BP3 sebagai badan pembantu penyelenggaraan pendidikan disekolah berperan memberikan bantuan dalam bidang keuangan kepada sekolah, bahkan peran inilah yang kemudian menjadi stigma yang melekat pada BP3. Sampai pada suatu saat, peran BP3 banyak diambil alih oleh kebijakan pemerintah dengan program SD Inpres, ketika bom minyak bumi telah menghasilkan dolar yang sangat besar kepada pemerintah.

2.1.1 Bentuk-Bentuk Partisipasi Komite Sekolah

a. Sebagai badan pemberi pertimbangan

Komite sekolah disini memberikan pertimbangan dalam hal pembuatan program sekolah. Di SMPN 1 Anggaberu Komite Sekolah memberikan pertimbangan dan masukan, Misalnya dalam hal pengadaan sarana dan prasarana bagi sekolah demi mengembangkan karakter religius.

b. Sebagai badan pendukung

Dalam hal ini partisipasi komite sekolah sebagai pendukung yaitu berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Komite sekolah juga ikut membantu dan menunjang dalam masalah sarana dan prasarana sekolah, dan juga dalam pengadaan fisik sekolah, disini komite sekolah melakukan kegiatan penggalan dana.

c. Sebagai badan pengawas/pengontrol

Partisipasi komite sekolah di SMPN 1 Anggaberu ini dalam hal pengontrol atau pengawas yaitu dalam hal keuangan dan jalannya proses belajar mengajar.

d. Sebagai badan penghubung

Dalam hal ini komite sekolah sebagai penghubung dengan pemerintah. Contohnya dalam hal peningkatan sarana dan prasarana untuk mengembangkan karakter religius. Komite sekolah penghubung dengan orang tua jika ada keluhan atau aduan yang berkaitan dengan peserta didik komite sekolah siap menyampaikan dengan pihak sekolah dan memberi masukan. Dan komite sekolah sebagai penghubung masyarakat dalam menyampaikan informasi berkaitan pendidikan ataupun kegiatan yang akan dilakukan bersama.

2.1.2 Peran Komite Sekolah

Komite sekolah mengemban empat peran sebagai berikut: (1) memberi pertimbangan, (2) pendukung, (3) pengawas, dan (4) mediator. Keempat peran komite sekolah tersebut bukan peran yang berdiri sendiri, melainkan merupakan peran yang saling terkait antara peran satu dengan peran lainnya (Sri Renani, 2008: 81-83)

- a. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Pemberi dukungan (supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan

- c. Melakukan pengawasan (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan (Hasbullah, 2007 : 92).

Peran komite sekolah memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan, mendukung penyelenggaraan pendidikan, mengontrol, mediator antara pemerintah dan masyarakat.

Depdiknas dalam bukunya berpartisipasi masyarakat, menguraikan tujuh peranan komite sekolah terhadap penyelenggaraan sekolah yakni:

- a. Membantu meningkatkan kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar disekolah baik sarana, prasarana maupun teknis pendidikan.
- b. Melakukan penilaian sikap dan perilaku siswa, membantu usaha pemantapan sekolah dalam mewujudkan pembinaan dan pengembangan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan demokrasi sejak dini, keterampilan dan kewirausahaan, kesegaran jasmani dan berolahraga, daya kreasi dan cipta, serta apresiasi seni dan budaya.
- c. Mencari sumber pendanaan untuk membantu siswa yang tidak mampu.
- d. Melakukan penilaian sekolah untuk pengembangan pelaksanaan kurikulum, baik intra maupun ekstrakurikuler dan pelaksanaan manajemen sekolah, kepala/wakil kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan.
- e. Memberikan penghargaan atas keberhasilan manajemen sekolah.
- f. Melakukan pembahasan tentang usulan rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah.
- g. Meminta sekolah agar mengadakan pertemuan untuk kepentingan tertentu

Masyarakat merupakan lembaga ketiga, sebagai lembaga pendidikan, dalam konteks penyelenggaraan pendidikan itu sendiri besar sekali peranannya. Berikut ini adalah beberapa peranan dari masyarakat terhadap pendidikan (sekolah) yaitu:

- a. Masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah.
- b. Masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan sekolah tetap membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan sekolah.
- c. Masyarakat yang ikut menyediakan tempat pendidikan seperti gedung- gedung museum, perpustakaan, panggung-panggung kesenian, kebun binatang dan sebagainya.
- d. Masyarakatlah yang menyediakan berbagai sumber untuk sekolah. Mereka dapat diundang kesekolah untuk memberikan keterangan- keterangan mengenai suatu masalah yang sedang dipelajari anak didik.
- e. Masyarakat sebagai sumber pelajaran atau laboratorium tempat belajar.
Disamping buku-buku pelajaran, masyarakat memberi bahan pelajaran yang banyak sekali, antara lain seperti aspek alami industri, perumahan, transport, perkebunan, pertambangan, dan sebagainya.
- f. Dalam jangka panjang, pendidikan adalah proses pembudayaan, studi mutakhir membuktikan bahwa budaya sekolah (school culture) memegang peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Budaya sekolah yang dimaksud adalah norma-norma yang berlaku dan dilaksanakan oleh warga sekolah, yang mampu menumbuhkan kembangkan kesadaran diri, watak, etos kerja, disiplin kerjasama, sikap pluralitas dalam berbagai aspek kehidupan, kreatifitas, produktifitas, kemampuan berfikir kritis, solideritas, toleransi, dan daya saing anak didik, untuk itu diperlukan dukungan pihak-pihak yang terkait agar sekolah dapat

melaksanakannya dengan baik, khususnya dari komite sekolah.

Dalam buku (Mulyasa, 2003:189) dijelaskan bahwa dalam rangka memberdayakan masyarakat dan lingkungan komite sekolah mempunyai peran sebagai berikut:

1. Memberi pertimbangan (advisory agency) dalam memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekolah, serta menentukan dan melaksanakan kebijakan pendidikan.
2. Mendukung (supporting agency) kerjasama sekolah dengan masyarakat, baik secara finansial. Pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
3. Mengontrol (controlling agency) kerja sama sekolah dengan masyarakat dalam rangka transportasi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan output pendidikan.
4. Mediator antara sekolah, pemerintah (eksekutif) dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD/Legislatif) dengan masyarakat.
5. Mendorong timbulnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
6. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan atau organisasi) dan dunia kerja, pemerintah, dan DPRD dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.
7. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan.
8. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi bagi kepala

pemerintah daerah dan DPRD, berkaitan dengan:

- a. Kebijakan dan program pendidikan
 - b. Kriteria kinerja pendidikan di daerah
 - c. Kriteria tenaga kependidikan, termasuk kepala sekolah
 - d. Kriteria sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kemampuan daerah
 - e. Berbagai kebijakan pendidikan
9. Mendorong orang tua dan masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan kualitas, relevansi, dan pemerataan pendidikan.
10. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap perencanaan pelaksanaan kebijakan, program dan output pendidikan.

Dari ulasan diatas jelas sekali bahwa peranan komite sekolah sangat kompleks yakni mulai dari perencanaan, pelaksanaan, mengontrol, mediator, sampai dengan evaluasi pendidikan dan sebagai komite mempunyai peran yang besar dalam mengembangkan karakter religius.

2.1.3 Fungsi komite sekolah

Fungsi komite sekolah sebenarnya merupakan penjabaran dari peranan komite sekolah tersebut. Artinya peran komite sekolah sangat terkait dengan fungsi komite sekolah sebagai berikut:

1. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: (1) kebijakan dan program pendidikan, (2) RAPBS, (3) kriteria tenaga kependidikan, (4) kriteria fasilitas pendidikan, dan (6) hal-

hal lain yang terkait dengan pendidikan.

2. Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan.
3. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.
4. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
5. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.
6. Melakukan kerjasama dengan masyarakat

Dalam menyalurkan peranannya komite sekolah secara umum memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Mendorong timbulnya komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat berkenaan dengan pendidikan yang bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang digunakan oleh masyarakat.
4. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan dalam hal kebijakan program pendidikan, penyusunan tenaga kependidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung, peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.

6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan.
7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program penyelenggaraan dan keluaran disatuan pendidikan. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak yang berkepentingan.
(Redaksi Sinar Grafika, 2008 : 37)

Selain itu komite sekolah merupakan organisasi orang tua peserta didik atau masyarakat yang berkewajiban membantu penyelenggaraan pendidikan termasuk pelaksanaan bimbingan dan konseling. Komite sekolah juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- c. Penampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- d. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - Kebijakan dan program pendidikan
 - Rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS)
 - Kriteria kinerja satuan pendidikan
 - Kriteria tenaga kependidikan

- Kriteria fasilitas pendidikan, dan
 - Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan
- e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan.
- g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program penyelenggaraan dan keluarga pendidikan disatuan pendidikan (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002)

2.1.4 Tujuan pembentukan Komite Sekolah

Maksud dibentuknya komite sekolah adalah agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu, komite sekolah yang dibangun harus merupakan pengembang kekayaan fisiologis masyarakat secara kolektif. Artinya komite sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (client model), berbagai kewenangan (power sharing and advocaey model) dan kemitraan (partnership model) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

Tujuan dibentuknya komite sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalah:

1. Mewadai dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
2. Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan

Dalam UU nomor 25 tahun 2000 tentang propenas pada butir 4 disebutkan perlunya peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, upaya tersebut antara lain pemerintah membentuk komite sekolah dan dewan pendidikan dengan tujuan utama ikut meningkatkan tanggungjawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, komite sekolah dan dewan pendidikan sendiri diatur dalam keputusan menteri pendidikan nasional No 044/U/2002 tanggal 2 April 2002.

2.2 Karakter Religius

2.2.1 Pengertian Karakter Religius

Dalam bahasa Arab, karakter memiliki makna yang hampir sama dengan akhlak, yang berarti tindakan yang mencerminkan jati diri seseorang. Al-Ghazali mengilustrasikan bahwa akhlak adalah perbuatan baik yang berasal dari hati. Karakter atau Akhlak adalah sesuatu yang sangat mendasar dan saling melengkapi. Manusia yang tidak berkarakter atau tidak berakhlak mulia disebut sebagai manusia tak beradab.

Karakter atau akhlak yang mulia itu harus dibangun. Sedangkan membangun akhlak mulia adalah melalui pendidikan, baik pendidikan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat (Dahrin, 2019 : 16-34)

Sedangkan, Lickona memandang karakter sebagai suatu watak dalam menanggapi situasi dengan cara yang terbaik dan tindakan yang bermoral. Lickona juga berpendapat bahwa karakter terdiri dari tiga bagian yang saling berkaitan, yang meliputi pengetahuan akan moral, perasaan, dan perilaku bermoral (Dian, 2019).

Berdasarkan definisi tentang karakter di atas, penulis mendefinisikan karakter sebagai sikap yang mencerminkan pribadi seseorang dalam bertingkah laku, berbicara, berpakaian, juga beribadah kepada Allah. Dari konsep karakter muncullah sebuah konsep tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan dalam membentuk kebiasaan baik pada setiap individu, utamanya pada anak-anak, sehingga karakter baik pada anak dapat tertanam sejak dini.

Ratna Meagawangi mendefinisikan pendidikan karakter sebagai sebuah usaha untuk membimbing anak-anak dalam menyelesaikan masalah dengan baik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari baik pada lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Fakry Gaffar juga mengemukakan definisi tentang pendidikan karakter, menurutnya pendidikan karakter adalah suatu proses untuk mentransfer nilai-nilai kehidupan agar dapat ditumbuh kembangkan oleh seseorang dalam bertingkah laku sehari-hari. Dari kedua definisi tentang pendidikan karakter yang telah disebutkan, terdapat 3 poin penting yakni: 1. proses untuk mentransfer nilai-nilai, 2) ditumbuh kembangkan dalam kepribadian,

dan 3) menjadi suatu kesatuan dalam perilaku (Kesuma, 2018).

Nilai-nilai karakter yang perlu ditanamkan pada anak adalah nilai universal yang meliputi nilai agama, moral, kewarganegaraan, adat istiadat, budaya, hukum, dll. Sebab nilai-nilai tersebut sangat mudah diterima oleh seluruh golongan masyarakat, sehingga mampu mempersatukan bangsa yang beraneka ragam budaya, agama, ras, adat istiadat, suku, dan latar belakang.

Pendidikan karakter yang dikembangkan di pesantren lebih fokus pada aspek religius, akhlakul karimah, kesederhanaan, disiplin, dan pemahaman tentang makna hidup. Sedangkan pada lembaga pendidikan formal siswa lebih ditekankan pada pengetahuan umum seperti ilmu pengetahuan alam, sastra, budaya, dan teknologi dengan kurikulum yang sudah tertata dengan baik dan sumber daya manusia yang mumpuni. Melalui proses perpaduan yang ada, kedepannya siswa diharapkan mampu menjadi pribadi yang unggul baik dari segi spiritual, intelektual, dan sosial.

2.2.2 Pembiasaan karakter religius

Pembiasaan merupakan proses yang membuat seseorang menjadi terbiasa akan sesuatu sehingga perilaku yang ditampilkan seakan terjadi begitu saja tanpa melalui perencanaan dan pemikiran lagi (Bahri & Zain, 1997 : 70) Oleh karena itu, pembiasaan merupakan suatu cara yang digunakan untuk membiasakan suatu sikap dan perilaku kepada orang lain

yang dilakukan secara berulang-ulang, sehingga nantinya kebiasaan tersebut akan terus tertanam dalam diri seseorang dalam menghadapi masalah kehidupannya.

Dalam menanamkan pembiasaan yang baik memang bukan hal yang mudah, seringkali membutuhkan waktu yang panjang. Akan tetapi jika suatu hal sudah

menjadi kebiasaan dan bagian dari diri seseorang, maka tidak mudah pula untuk mengubahnya. Menanamkan pembiasaan yang baik bagi anak sangat penting. Seperti halnya salat lima waktu, berpuasa, suka menolong orang yang kesusahan, membantu fakir miskin dan lain sebagainya. Pembiasaan merupakan metode pendidikan yang sangat penting dalam agama Islam sangat mementingkan pendidikan dengan pembiasaan. Adanya pembiasaan tersebut memiliki tujuan agar peserta didik dapat melaksanakan ajaran agama secara istiqamah (Ramayulis, 2018 : 37)

Karakter religius merupakan salah satu dari nilai-nilai karakter yang ditumbuh kembangkan disekolah. Heri Gunawan mendefinisikan karakter religius sebagai nilai karakter yang berkaitan dengan hubungan dengan tuhan yang meliputi pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan/atau ajaran agamanya. Nilai-nilai religius yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Sedangkan dimensi dari religiusitas menurut Muhaimin ada lima macam yakni dimensi keyakinan, dimensi praktik agama, dimensi pengalaman, dimensi pengetahuan beragama dan dimensi pengamalan dan konsekuensi.

Pelaksanaan pembiasaan yang dilaksanakan secara terprogram akan selaras dengan teori pembiasaan berdasarkan pendapat Mulyasa yang menyatakan bahwa kegiatan pembiasaan secara terprogram dapat dilaksanakan dengan perencanaan khusus dalam kurun waktu tertentu baik untuk pengembangan pribadi peserta didik secara individual, kelompok dan klasikal (Mulyasa, 2013 : 167)

Tujuan dari sekolah membentuk karakter siswa melalui pembiasaan adalah untuk mencetak lulusan yang berakhlak mulia, beradab dan memiliki etika yang terpuji sebagai bekal kehidupan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Dengan hal tersebut pihak sekolah terus berupaya secara serius dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pembiasaan guna membentuk karakter siswa kelas dengan cara melakukan program program pembiasaan yang dinamis. Proses penanaman karakter tidak hanya melalui proses pembelajaran di kelas saja, akan tetapi melalui penerapan karakter peserta didik dengan pembiasaan.

2.2.3 Kendala pembiasaan Karakter Religius di Sekolah

Secara umum, pelaksanaan pembiasaan guna membentuk karakter religius memiliki beberapa kendala, sebagai berikut:

1. Perilaku Bawaan/Naluriiah

Perilaku bawaan maksudnya adalah fitrah karakter anak yang dibawa sedari lahir. Perbedaan karakter ini, menyebabkan respon yang berbeda-beda terhadap hal yang telah dilakukan oleh siswa berdasarkan pengalaman belajar di lingkungan sekolah.

Termasuk dalam menerapkan pembiasaan-pembiasaan yang ada di sekolah. Dari karakter yang berbeda ini tentunya memerlukan treatment yang berbeda pula untuk masing-masing anak. Terdapat sebagian anak didik yang dapat dengan mudah mengubah sikap dan perilaku dengan hanya teguran saja, akan tetapi ada yang harus dengan tindakan tegas.

2. Pola asuh yang berbeda

Pola asuh merupakan pola interaksi antara orang tua dengan anak yang

mencakup pemenuhankebutuhan fisik, psikologis, dan sosialisasi norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya (Jalaluddin & Abdullah, 2013 : 215). Jadi pola asuh juga dapat diungkapkan sebagai pola interaksi antara anak dengan orang tua yang di dalamnya terdapat proses pendidikan di lingkungan keluarga. Jika orang tua menanamkan pola asuh yang baik tentu perkembangan anak dan karakter anak akan terbentuk dengan baik pula.

Pola asuh telah menjadi satu dari beberapa faktor yang berpengaruh terhadap karakter anak dalam aktivitas hidupnya. Sejak kecil anak diasuh oleh kedua orang tua dengan pendidikan yang berbeda-beda. Mereka melakukan segala aktivitas di lingkungan sekolah tentu punya ciri khas yang berbeda- beda. Misalnya saja ada siswa yang diperintah gurunya untuk menjadi khatib, ada anak yang siap bersedia dan ada juga anak yang tidak bersedia karena merasa kurang percaya diri. Dari hal tersebut dalam dipahami bahwa pola asuh yang diberikan orang tua akan berpengaruh juga terhadap kualitas anak.

3. Latar belakang pendidikan siswa

Pendidik bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan dan mutu pendidikan. Akan tetapi faktor potensi anak didik juga memiliki andil penting. Salah satu hal yang berkaitan dengan potensi kebaikan peserta didik adalah latar belakang pendidikan. Pembelajaran yang efektif adalah ketika guru mampu mengidentifikasi dan memahami beragam karakteristik peserta didik, serta mampu melaksanakan pembelajaran dengan tanpa mengenyampingkan berbagai macam karakteristik peserta didik tersebut (Agung Setiyawan, 2018).

4. Kurang maksimalnya pengondisian dan dukungan dari tenaga pendidik

Pengondisian berkaitan dengan upaya sekolah untuk menata lingkungan fisik maupun non fisik demi terciptanya suasana yang mendukung terlaksananya pendidikan karakter. Selain jumlah guru PAI yang terbatas, juga dipengaruhi oleh kurang maksimalnya dukungan dari guru-guru mata pelajaran lain, masih terdapat anggapan bahwa pembiasaan religius menjadi kewajiban dari kepada guru PAI saja.

mengenyampingkan berbagai macam karakteristik peserta didik tersebut.

5. Teman Sebaya

Teman sebaya adalah seseorang yang mempunyai usia, status dan pola pikir yang hampir sama. Teman sebaya mempunyai kontribusi bagi siswa di mana pun mereka berada, demikian juga di lingkungan sekolah (Yusuf Kurniawan,2018). Ketika sesama teman memiliki kebiasaan untuk saling mengingatkan mengenai iaturan di sekolah, maka akan mendukung proses internalisasi karakter religius. Seperti halnya mereka akan menegur teman ketika mereka tidak mau melakukan pembiasaan yang ada di sekolah. Tentu akan sangat mendukung terciptanya karakter tersebut, begitu juga sebaliknya.

6. Media Sosial

Media dan sosial merupakan dua kata yang membentuk istilah media sosial. Media dapat diartikan sebagai alat komunikasi. Sedangkan kata sosial dimaknai sebagai sebuah kenyataan sosial yang memiliki makna bahwa masing-masing individu melakukan tindakan yang memiliki kontribusi terhadap masyarakat. Kalimat di depan menjelaskan bahwa semua perangkat

lunak dan media merupakan social atau bisa dipahami bahwasannya keduanya adalah hasil dari proses sosial. Dengan demikian media sosial merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna dalam proses social (Musawarman & Aldila, 2017 : 25).

Perkembangan media sosial, hal ini tentu akan menimbulkan hal yang positif dan negatif terhadap karakter siswa di Sekolah. Hal positifnya siswa akan banyak belajar melalui media sosial yang dimiliki masing-masing siswa. Walaupun begitu, jika siswa tidak memiliki kontrol diri dan kebijakan diri dalam menggali segala informasi yang ada melalui media sosial, maka siswa nantinya akan terjerumus ke dalam hal yang tidak diinginkan. Siswa tentu akan meniru segala sesuatu yang ada di media social dan menyebarkan segala informasi tanpa mengetahui bukti kebenarannya dan sumber yang jelas.

7. Sarana dan prasarana

Aspek penting dalam menjalankan pendidikan yang berkualitas salah satunya adalah fasilitas pendidikan. Fasilitas adalah sarana dan prasarana yang harus disediakan dan diberikan dengan tujuan memberikan kelancaran pada kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah (Popi sopiatin, 2010). Sarana pendidikan merupakan peralatan dan perlengkapan yang dimanfaatkan untuk menunjang proses pendidikan secara langsung. Sedangkan prasarana pendidikan merupakan fasilitas penunjang berjalannya proses pendidikan secara tidak langsung.

2.2.4 Solusi untuk kendala pembiasaan karakter religious

a. Sosialisasi pentingnya pendidikan karakter

Sosialisasi merupakan suatu proses dimana seseorang diharuskan untuk mampu menyesuaikan dan menempatkan diri sesuai dengan pola perilaku individu yang ada di sekitar individu tersebut.

Penyesuaian ini mencakup beberapa aspek yang terdiri dari kebiasaan, sikap, ide-ide, pola hubungan sosial, nilai dan tingkah laku (Anwar, 2018). Tahap ini merupakan pondasi yang dapat menjadi dasar pembentukan diri pribadi anak. Pada lingkungan sekolah, peserta didik pasti akan berinteraksi dengan pola-pola perilaku yang bermacam-macam dan unik. Hal ini disebabkan karena perbedaan bahasa, suku, agama dan budaya yang berbeda. Sekolah menyadari pentingnya proses sosialisasi pendidikan karakter antara guru dan siswa. Dengan adanya sosialisasi akan memudahkan proses yang ingin dicapai terkait dengan pembentukan karakter religius dan juga berbagai karakter yang akan dibentuk oleh sekolah sesuai tujuan sekolah. Proses sosialisasi dilakukan secara langsung dan terjadwal yang ditujukan bagi keseluruhan komponen sekolah yaitu mulai dari kepala sekolah, guru dan siswa.

b. Tata tertib

Tata tertib adalah serangkaian aturan yang harus ditaati oleh seluruh komponen sekolah. Tata tertib sekolah berbentuk peraturan tertulis yang dibuat sekolah dan wajib ditaati oleh seluruh warga sekolah guna melaksanakan tata tertib yang ada. Tata tertib disekolah dibentuk untuk mengatur serangkaian kegiatan sekolah sehingga akan tercipta suasana yang

tertib dan teratur. Adanya tata tertib di Sekolah berfungsi sebagai control perilaku siswa, pedoman perilaku siswa, dan lain sebagainya. Tata tertib ini dilaksanakan dan dievaluasi oleh kepala sekolah dan guru.

Untuk melihat ketercapaian, kendala dan hambatan di lapangan, untuk selanjutnya apakah perlu diadakan pembaharuan atau tidak sesuai karakteristik dan perkembangan karakter siswa.

c. *Reward dan Punishment.*

Ngalim Purwanto mendefinisikan reward (ganjaran) sebagai alat yang dapat digunakan untuk mendidik anak agar mereka merasa senang karena apa yang telah dilakukan memperoleh penghargaan. Reward merupakan suatu penghargaan atau apresiasi yang telah diberikan kepada seseorang dalam bentuk materi atau ucapan. Reward yang diberikan di Sekolah dalam pelaksanaan pembiasaan karakter religius siswa tidak harus berupa barang akan tetapi bisa juga dengan kata-kata pujian. Misalnya ketika siswa mendapatkan nilai yang memuaskan, datang ke sekolah tepat waktu, menjadi muadzin, dan menjadi kultum salat dhuhur, membantu bapak dan ibu guru dan beberapa tindakan lainnya. Salah satu reward yang diberikan berupa kata-kata kepada siswa adalah dengan ucapan terima kasih. Selain itu seorang guru tidak bosan-bosan juga untuk terus mengajak siswanya untuk melaksanakan pembiasaan di sekolah.

Sedangkan punishment (hukuman) adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru, dan sebagainya) sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan atau kesalahan. Punishment merupakan cara yang dilakukan untuk memberikan hukuman atau

peringatan agar tingkah laku seseorang bisa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Masing-masing guru memiliki cara sendiri dalam menerapkan punishment kepada peserta didiknya. Salah satu hal yang dilakukan oleh guru PAI ketika yang mengetahui anak didiknya tidak mengikuti pembiasaan sekolah seperti salat jumat, salat dhuha, salat dhuhur berjamaah, dan pembiasaan lainnya. Guru tersebut memberikan punishment berupa teguran, peringatandan hukuman kepada siswa. Hukuman yang diberikan tidak berupa fisik (seperti menendang, memukul dan lain sebagainya). Ketika siswa melakukan kesalahan yang sama lebih dari tiga kali, biasanya guru meminta siswa untuk membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh wali kelas, BK, dan orang tua. Hal tersebut dilihat dari tindakan apa yang sudah dilakukannya. Dengan adanya punishment tersebut harapannya adalah siswa bisa tertib menjalankan aktivitas pembiasaan dan kegiatan belajar lainnya di sekolah sesuai tata tertib yang ada.

d. *Controlling* (pengawasan)

Controlling dapat diartikan sebagai salah satu kegiatan untuk mengetahui realisasi perilaku personal dalam organisasi pendidikan dan apakah tingkat pencapaian sesuai dengan yang dikehendaki, kemudian dari hasil pengawasan tersebut apakah dilakukan perbaikan (Syaiful Pagala, 2013). Controlling juga merupakan proses pengawasan dan pengendalian yang dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan yang sudah terprogram dapat dijalankan sesuai dengan target dan tujuan yang diharapkan. Dengan adanya proses pengendalian akan tercipta keselarasan dan ketertiban.

Proses controlling atau pengawasan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan pembiasaan karakter religius siswa dengan cara bekerjasama dengan bapak ibu guru, wali kelas, BK dan wali murid. Hal tersebut dilakukan guna mengawasi atau mengontrol setiap aktivitas yang lakukan siswa dilingkungan sekolah atau keluarga. Dengan sistem controlling atau pengawasan dapat menjadi bahan evaluasi agar melaksanakan program yang dijalankan bisa lebih baik lagi.

e. Penambahan Sarana dan Prasarana

Fasilitas merupakan segala sesuatu yang dapat membantu dan memudahkan seluruh kegiatan atau aktivitas pendidikan. Fasilitas di Sekolah harus lengkap. Untuk mengatasi kendala pada saat musim kemarau panjang yaitu berkaitan dengan berkurangnya air yang digunakan untuk wudhu. Maka sekolah mengupayakan untuk mengatasi hal tersebut dengan menambahkan fasilitas wudhu termasuk sumber air dan membuat tempat wudhu di sekitar masjid. Fasilitas tersebut terdiri dari tempat wudhu darurat untuk laki-laki di sebelah selatan masjid dan tempat wudhu perempuan di sebelah utara masjid. Karena pada saat ini masih sering dijumpai tempat wudhu darurat tersebut masih tercampur antara laki-laki dan perempuan.

2.3 Kajian Relevan

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Rosyidah (2010) “Peran Komite Sekolah Dalam Menunjang Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di SMPN 2 Sukawangi Bekasi”	Menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif dalam proses penelitiannya.	Penelitian yang dilakukan rosyidah dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu penelitian rosyidah menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket dengan menggunakan 4 alternatif jawaban
			sementara penelitian saya tidak menggunakan angket.
2.	Fadli Hasan (2011) “Peana Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMPN 244 Jakarta”	Penelitian dilakukan untuk menjawab rumusan masalah tetapi tidak untuk menguji hipotesis.	Penelitian yang dilakukan fadli hasan menggunakan analisis data untuk menjawab rumusan masalah dengan menggunakan presentase. Sementara penelitian yang saya lakukan lebih bersifat penjelasan deskriptif.
3.	Bodi Kurniawan (2011) “Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Pebangunan UIN Jakarta”	Melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dalam proses pelaksanaanya.	Bodi Kurniawan dalam pengecekan keabsahan datany tidak menggunakan perpanjangan pengamatan dan meningkatkan ketekunan
4.	Herisifina Fauziah (2015) “Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMPN 3 Cisauk”	Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif	Heridfina fauziah dalam pengecekan keabsahan datanya hanya menggunakan triangulasi.

5.	Ngisa (2017) “Partisipasi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MI Ma’ruf NU Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyuwangi”	Menggunakan Metode yang sama dalam proses penelitiannya yaitu kualitatif	Penelitian Ngisa Mengarah kepada mutu pendidikan. Sedangkan saya menaruh kepada karakter religius disekolah.
----	--	--	--

Jadi, Penelitian diatas menggunakan metode yang sama dengan yang saya lakukan yaitu penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, kesamaan lainnya yaitu komite sekolah sebagai objek yang akan diteliti. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian diatas menggunakan variable yang berbeda dengan penelitian yang saya lakukan dimana penelitian terdahulu mendalami peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan saya memfokuskan kepada partisipasi komite sekolah dalam upaya mengembangkan karakter religius yang ada di SMPN 1 Anggaberu

2.4 Kerangka Pikir

Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang dibentuk untuk membantu pihak sekolah, komite sekolah juga harus berpartisipasi dalam mengembangkan karakter religius siswa. Bukan hanya pendidik saja yang berpartisipasi dalam hal tersebut, tetapi juga komite sekolah dan sekolah harus saling bekerja sama dalam mengembangkan karakter religius siswa di SMPN 1 Anggaberu.

